

LAPORAN TRIWULAN III

LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT
PROVINSI TRIWULAN III TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan triwulan ini yang berjudul "Laporan Triwulan III Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi selama Triwulan III. koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparatur pemerintahan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini dan penyusunan laporan triwulan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di masa yang akan datang.

Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,



HARYATMIN, S.IP.
Penata Tk. I
NIP. 19761005 199803 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan.....	4
1.4 Anggaran.....	5
BAB II PELAKSANAAN	6
2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	6
2.2 Realisasi Keuangan.....	40
BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN	41
3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	41
3.2 Kendala dan Solusi.....	42
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun 2025 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Kewaspadaan Dini pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Kewaspadaan Dini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Dini serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Deteksi Dini mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, deteksi dan cegah dini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dalam mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan memberikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2025 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan khususnya di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.
- b. Sasaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu :
 - 1) Masyarakat, Pelaku Usaha dan Badan Usaha;
 - 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

1.4 Anggaran

Terdapat perubahan pagu anggaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dari semula sebesar Rp. 606.721.400,- (enam ratus enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 287.972.900,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau terjadi pengurangan pagu sebesar 52,53 % (lima puluh dua koma lima puluh tiga persen) sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
	JUMLAH		%					
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi			
	1.05.	02.1.	02	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	287.972.900,-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dok

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan III (Juli – September) Tahun Anggaran 2025, yaitu :

A. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Aksi Unjuk Rasa dari Elemen Masyarakat, berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1001 /SATPOL.PP-B tanggal 18 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada Aksi Damai Aliansi Kalbar Menggugat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

TUNTUTAN :

MENOLAK DENGAN TEGAS program transmigrasi dalam bentuk apapun yang di masukan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya Program 5T yang ditetapkan oleh Kementerian Transmigrasi sebagai Program Unggulan di Seluruh Wilayah Kalimantan Barat.

MENUNTUT Pemerintah Pusat melalui Kementerian Transmigrasi untuk menghapuskan program transmigrasi untuk masyarakat dari Luar wilayah Kalimantan dan melampaui seluruh wilayah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat.

MENUNTUT Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah untuk mengambil alih kembali tanah-tanah yang telah ditinggalkan bahkan dijual oleh transmigran dari program-program sebelumnya. Dan mengembalikan tanah-tanah tersebut untuk dapat dikelola oleh masyarakat lokal setempat

MENUNTUT Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan sengketa maupun konflik agraria yang terjadi akibat dari program transmigrasi yang sebelumnya dilaksanakan. Dan mengembalikan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terdampak dari program transmigrasi tersebut.

MENUNTUT Pemerintah Pusat untuk tidak menerbitkan SHM pada lokasi transmigrasi yang bermasalah dengan merugikan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terdampak konflik, dan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak dalam program transmigrasi sebelumnya.

MENDESAK PEMERINTAH PUSAT untuk mengalihkan dana revitalisasi Program Transmigrasi khusus di Kalimantan Barat agar digunakan kembali

pada Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik dan Air Bersih. Meminta Pemerintah Pusat MEMAKSIMALKAN program transmigrasi lokal yang sudah ada di Kalimantan Barat untuk dilakukan Pembinaan dan Dukungan Infrastruktur. Meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memasukkan Program Transmigrasi Lokal antar Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah tahun 2029–2034.

Pada pukul 14.15 massa aksi Unras membubarkan diri masing-masing tanpa ada gangguan trantibum.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1067 /SATPOL.PP-B tanggal 29 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Damai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Pimpinan Cabang (PC- IMM) di kantor DPRD provinsi Kalbar

Yang menghadiri kegiatan sebagai berikut :

DPRD Provinsi Kalbar :

1. Fransiskus ason (Fraksi Golkar)
2. Zulfidar.(Fraksi PAN)
3. Heri Mustamin Sy (Fraksi Golkar)
4. Ishak ali al muntahar (Fraksi Gerindra)

Tuntutan aksi pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

(PC IMM) kota Pontianak :

- (A) Menuntut Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk membongkar dan mengadili mafia penambang emas tanpa ijin (PETI) serta aktor-aktor negara yang turut melindungi dan memberikan praktik ilegal tersebut.
- (B) Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Barat untuk memberikan mata pencaharian alternatif dan program pemberdaya ekonomi kepada masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas PETI, sebagai solusi jangka panjang yang adil dan berkelanjutan.
- (C) Menutup Penanganan serius terhadap kasus-kasus intoleransi berbasis suku, ras, dan agama yang terjadi di Kalimantan Barat serta mendorong penegakan hukum dan perlindungan terhadap keberagaman dan nilai-nilai kebangsaan.
- (D) Mendesak DPR RI dan pemerintah pusat untuk membuka ruang pembahasan rancangan kitab undang-undang hukum pidana RKUHP serta partisipatif, transparan, dan demokratis serta menghindari pasal-pasal kontroversial yang berpotensi membukam kebebasan sipil dan demokrasi.
- (E) Menuntut DPRD Kalimantan Barat untuk lebih tegas dan progresif dan mengawasi kinerja pemerintah daerah, khusus terkait pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam.

(F) Mendesak Pemerintah untuk mengundang seluruh kepala adat dan pemuka agama guna mengadakan dialog terbuka dalam rangka meredam potensi konflik identitas,serta memperkuat rekonsiliasi sosial antar suku,adat,dan agama di Kalimantan Barat Jumlah Peserta yang hadir 43 orang

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1226 /SATPOL.PP-B tanggal 26 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Unjuk Rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Polda Kalbar, Polresta Pontianak, Koramil Selatan dan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan antisipasi potensi gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pontianak berhasil mengamankan 14 orang yang diduga melakukan Aksi Demo secara anarkis sehingga sempat menyebabkan chaos dilokasi Aksi Demo.

Demo yang dilakukan aliansi mahasiswa serta masyarakat sempat *chaos* dan massa aksi terpaksa harus didorong mundur oleh pihak pengamanan dari titik awal di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat hingga ke Tugu Digulis Untan.

Aksi Demo berujung diamankan 14 orang oleh pengamanan Polresta Pontianak melalui unit Jatanras, tiga diantaranya adalah anak dibawah umur.

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Suyono menjelaskan, pada aksi demo ini pihaknya mengamankan sebanyak 14 orang yang anarkis 3 diantaranya anak dibawah umur.

Ia kemudian mengatakan bahwa, untuk selanjutnya jika ingin melakukan aksi demo serta menyampaikan aspirasi mahasiswa maupun masyarakat agar melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian dan dapat menyampaikan aspirasinya secara aman dan tertib.

Kedepannya saya minta agar jika melaksanakan aksi demo dan ingin menyampaikan aspirasi kembali mohon dilakukan secara tertib dan aman agar situasi dapat kondusif," ungkapnya.

Kapolresta Pontianak kemudian mengatakan bahwa, dirinya sangat menyayangkan karena sempat terjadi chaos dilapangan.

Kapolresta Pontianak itu juga mengatakan bahwa, dalam aksi demo kali ini juga terdapat 5 personel pengamanan yang menjadi korban dari anarkisnya mahasiswa diantaranya, 1 Anggota Brimob, 1 Anggota Polresta, dan 3 Anggota Ditsamapta Polda Kalbar.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1237 /SATPOL.PP-B tanggal 28 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Unjuk Rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Polda Kalbar, Polresta Pontianak, Koramil Selatan dan Sat Pol Pp Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan antisipasi potensi gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Aksi demonstrasi menolak kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI kembali terjadi di DPRD Kalbar, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus kembali menggelar aksi demonstrasi menyuarakan ketidakadilan pemerintah yang meningkatkan tunjangan DPR RI di tengah kondisi ketimpangan pendapatan dan pembangunan daerah.

Massa yang hadir meluapkan kekesalan mereka dengan memasang bendera one piece sebagai ganti bendera merah putih. Disamping itu, mereka juga membakar ban.

Wakil Ketua DPD GMNI Kalbar, Sisilius Rami, menegaskan aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil bagi rakyat. Ia menyebut, aksi kali ini bukan yang pertama. Melainkan hari ini kedua mereka datang menyuarakan ketidakadilan di negeri ini. Namun, kami tidak disambut baik. Bahkan kemarin kami dipukul. Apakah ini polisi yang katanya mengayomi?" tegas Sisilius. Ia menyoroti tajam paradoks yang terjadi di negeri ini. Di satu sisi, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti jalan dan jembatan rusak, tetapi di sisi lain justru DPR mendapatkan tambahan tunjangan. Mereka digaji dari pajak rakyat, tapi yang kami terima justru kekerasan dan benturan. Harusnya DPR peka terhadap keresahan masyarakat, bukan sekadar joget-joget dan bersenang-senang.

Sementara itu, peserta aksi yang lainnya juga menyoroti kesenjangan pendapatan guru yang dianggap beban negara. Belum lagi, kesejahteraan petani, nelayan yang sampai saat ini kurang diperhatikan pemerintah.

Aksi ini dikawal ratusan polisi. Dalam aksi ini hadir anggota DPRD Kalbar, Fraksi PAN, Maskur dan Anggota DPRD Kalbar dari Partai Demokrat, Neneng.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1243 /SATPOL.PP-B tanggal 29 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi Kalbar Bergerak di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Ribuan massa yang tergabung dari pelajar, mahasiswa dan masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan 5 (lima) poin tuntutan di Halaman Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pada Jumat 29 Agustus 2025. Pantauan di lapangan, ratusan pengunjung rasa mahasiswa yang dikoordinatori oleh Dika tersebut mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat berjalan kaki dengan pengawasan ketat dari aparat Kepolisian Polresta Pontianak. Saat tiba di Gedung DPRD Kalbar, massa pengunjung rasa menyampaikan tuntutan agar tunjangan DPR RI dihapuskan karena dianggap menyakiti perasaan masyarakat dan meminta agar Kapolresta Pontianak dicopot dari jabatannya.

Berikut poin-poin tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Menggugat, yakni :

- Hapuskan tunjangan DPR yang menyakiti perasaan rakyat Indonesia
 - Copot Kapolres, terkait represifitas dan terlukanya rekan seperjuangan saat demonstrasi
 - Evaluasi Satgas PKH di Kalbar
 - Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Kalbar
 - Kawal 19 juta lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan Rakyat Indonesia.
- Sekitar pukul 18.08 WIB, Aksi unjuk rasa penyampaian 5 (lima) tuntutan di Gedung DPRD Kalbar tersebut jadi memanas ketika massa mulai melemparkan minuman mineral dan sampah ke arah petugas yang sedang melakukan pengamanan di Gedung DPRD Kalbar. Setelah diingat agar massa membubarkan diri, pihak Kepolisian pun berhasil membubarkan dan memukul mundur massa dari Halaman Gedung DPRD Kalbar setelah tembakan gas air mata hingga ke Bundaran Digulis Pontianak. Dalam peristiwa tersebut, satu kepala Mahasiswa diduga terkena tembakan peluru dan beberapa massa lainnya di larikan ke rumah sakit Untan Pontianak dan beberapa massa baik dari pelajar, mahasiswa dan masyarakat sipil sempat diamankan Polisi. Situasi tersebut semakin memicu amukan massa, sehingga massa membakar motor Polisi dan melempari mobil dinas Polisi hingga pecah kaca depan. Namun situasi kembali kondusif setelah pihak TNI mediasi pembebasan massa yang sebelumnya sempat ditahan.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1248 /SATPOL.PP-B tanggal 29 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi Kalbar Bergerak di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Ratusan mahasiswa, masyarakat, hingga pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Kalimantan Barat menggelar aksi besar-besaran di Lapangan Jananuraga, Polda Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalbar, Sabtu (30/8/2025).

Aksi yang digalang Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kalbar ini menuntut pertanggungjawaban Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto dan Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian.

Koordinator Lapangan, Hafis, menegaskan aksi tersebut sebagai wujud keresahan rakyat Kalbar. Menurutnya, demokrasi yang seharusnya dijaga justru terancam akibat tindakan kekerasan aparat.

Beberapa waktu lalu di Pontianak, tepatnya tanggal 27 dan 29 Agustus, rekan-rekan mahasiswa mengalami kekerasan. Presiden Mahasiswa Polnep sampai mengalami luka di kepala, dan di Universitas Tanjungpura polisi menembakkan gas air mata hingga mengenai kepala mahasiswa. Kami punya bukti visum dan dokumentasi," kata Hafis.

Dalam aksi ini, massa menggelar Mahkamah Rakyat dengan menghadirkan sosok Kapolresta Pontianak, sedangkan Kapolda Kalbar hanya diwakili oleh salah satu perwira bunga tiga.

Dalam Mahkamah Rakyat tersebut, peserta aksi menjatuhkan vonis kepada Kapolresta Pontianak dan Kapolda Kalbar untuk dicopot dari jabatannya.

Aliansi juga menyampaikan enam tuntutan, dengan poin utama mendesak Kapolda dan Kapolresta Pontianak mundur dari jabatannya serta meminta aparat yang memukul mahasiswa dihukum sesuai undang-undang.

Sekitar pukul 17.00 WIB, setelah menandatangani hasil vonis Mahkamah Rakyat dan menyerahkan kepada kepolisian, massa kembali melanjutkan long march ke Kantor DPRD Kalbar.

Meski sempat melakukan aksi kembali di halaman Kantor DPRD, peserta aksi tak lama membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB.

Berdasarkan pantauan di lapangan petugas kepolisian sempat mengamankan sejumlah anak bawah umur yang diduga akan ikut melakukan demonstrasi.

Selain itu didapatkan juga seseorang yang membawa tas di dalamnya berisikan bom molotov yang terbuat dari botol kaca berisi bahan bakar dan sumbu, di depan gerbang Polda Kalbar.

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1259 /SATPOL.PP-B tanggal 1 September 2025, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 September 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Unjuk Rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Universitas Tanjung Pura di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Gelombang Demonstrasi terus berlanjut di Kota Pontianak, Kalbar. Ratusan Mahasiswa Kembali Mendatangi Kantor DPRD Kalbar Pada Senin Kali Ini, Gubernur Kalbar Ria Norsan Turun Langsung Menemui Massa aksi yang berasal dari BEM Fisip Untan Pontianak.

Norsan Ditemani Ketua DPRD Aloysius, Kapolda Irjen Pol Pipit Rismanto, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael Serta Jajaran Dewan

Lainnya. Mereka Berdialog Dengan Penuh Keakraban Bersama Para Mahasiswa Tanpa Ada Sekat Maupun Pengamanan Berlebih.

Menurut Bapak Gubernur, menemui mahasiswa ini tak berbeda dengan menemui anak-anaknya yang sedang menyampaikan aspirasi.

Bapak Gubernur juga memberikan apresiasi soal aksi mahasiswa ini. menurutnya, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa berlangsung tertib dan santun.

Saya ingin aksi demo dilakukan secara terukur, terkoordinir, dan tidak merugikan pihak lain. semua permasalahan insyaallah bisa diselesaikan lewat musyawarah dan mufakat," katanya.

Di akhir penyampaiannya, gubernur mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas daerah. "mari kita sikapi situasi dan kondisi dengan arif dan bijaksana, tidak mudah terpancing berita hoaks. semoga kalimantan barat, khususnya indonesia, tetap aman, damai, tenteram, dan harmonis," tutupnya. Setelah menandatangani daftar tuntutan, massa mulai tenang. mereka kemudian membaca doa bersama untuk kepergian para korban yang menuntut keadilan di seluruh tanah air.

8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1270 /SATPOL.PP-B tanggal 2 September 2025, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Unjuk Rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Panca Bhakti di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Sekitar seratus mahasiswa dari Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat, Selasa, 2 September 2025.

Aksi yang berlangsung tertib ini menyampaikan sejumlah tuntutan kritis terkait reformasi sistem politik, transparansi anggaran, hingga penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR.

Koordinator Lapangan, Krisna Sumardi, didampingi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Marselius, dan BEM Fakultas Teknik, Oktavianus Egi, menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, yang hadir menerima perwakilan mahasiswa.

Kami datang bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menyuarakan keinginan rakyat yang selama ini terabaikan," ujar Krisna dalam orasinya.

Dalamuntutannya, mahasiswa secara tegas menolak kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih terpuruk. Mereka menilai anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun perlu dikaji ulang secara transparan.

Anggaran sebesar itu harus dipertanggungjawabkan secara jelas. Kami minta audit internal dilakukan oleh lembaga netral, dan laporan penyerapan anggaran wajib disampaikan ke publik setiap bulan," tegas Marselius.

Selain itu, mahasiswa menuntut reformasi internal DPR di antaranya. Pemangkasan jumlah anggota DPR dan anggaran yang tidak mendesak. Ada juga penolakan terhadap mantan narapidana korupsi untuk duduk sebagai anggota DPR maupun di BUMN.

Tuntutan lainnya yakni Penghapusan fasilitas istimewa yang memperlebar kesenjangan dengan rakyat, seperti. Pembebasan pajak PPh 21 yang ditanggung APBN, sistem pengawalan khusus, penyediaan kendaraan pribadi dinas, cukup dengan akses transportasi umum gratis.

Tak kalah penting tuntutan pensiun seumur hidup hanya untuk satu periode masa jabatan anggota DPR RI.

Aksi ini juga menyampaikan tujuh tuntutan lanjutan untuk pemerintah dan lembaga negara. Seperti meminta KPK diminta memeriksa seluruh anggota DPR secara berkala.

Sidang dan rapat DPR harus disiarkan langsung (live) agar transparan bagi publik. Evaluasi ulang Satgas PKH yang dinilai merugikan masyarakat.

Lakukan juga, Perbaiki fasilitas pendidikan yang merata serta standar gaji layak bagi guru.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1278 /SATPOL.PP-B tanggal 3 September 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kalimantan Barat di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Aksi damai aliansi mahasiswa Kalbar di Gedung DPRD menjadi ruang dialog sehat bersama Gubernur Ria Norsan. Aspirasi mereka mencakup isu penting: lingkungan, masyarakat adat, ketenagakerjaan, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), hingga kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas cara mahasiswa menyuarakan pendapat dengan santun. Menurutnya, suara mahasiswa adalah energi perubahan yang tidak boleh diabaikan. Ia menekankan bahwa banyak masukan mahasiswa sejalan dengan program pembangunan Pemprov Kalbar, terutama peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dialog ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa bukan hanya kritik, tapi juga dorongan agar pemerintah terus berbenah. Kalbar membutuhkan semangat bersama, agar ruang demokrasi tetap hidup dan aspirasi bisa menjadi solusi nyata. Mari kita jaga kedamaian dan kondusifitas Kalbar sebagai Rumah Kita Bersama.

10. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1375 /SATPOL.PP-B tanggal 23 September 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Aksi Serikat Petani Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

PW SPI Kalimantan Barat menggelar aksi damai di kantor Gubernur pada 24 September 2025 untuk memperingati Hari Tani Nasional. Aksi ini menegaskan bahwa perjuangan petani di daerah adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan menuntut pelaksanaan reforma agraria sejati.

Momentum Hari Tani Nasional 2025 menjadi pengingat bahwa perjuangan harus terus dilanjutkan hingga reforma agraria sejati benar-benar terwujud.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai sektor dalam momentum Hari Tani Nasional.

Dalam pertemuan terbuka ini, perwakilan buruh, petani, nelayan, hingga masyarakat adat menyampaikan langsung beragam permasalahan yang mereka hadapi, mulai dari isu upah layak, sengketa lahan, akses BBM subsidi, hingga perlindungan hak-hak adat.

Gubernur menegaskan komitmennya untuk melakukan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.

B. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Kenakalan Remaja, berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 900 /SATPOL.PP-B tanggal 03 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum pada Kegiatan Koordinasi di Kantor Satpol PP Mempawah Tentang Kenakalan Remaja Dan Anak - Anak Nongkrong Pada Jam Malam di lingkungan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Hasil Kegiatan :

- a. Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2025 anggota tim Satpol PP Provinsi Kalbar melakukan koordinasi untuk melakukan razia para remaja yang sering nongkrong di jalan-jalan ,trotoar ,gang ,maupun di cafe-cafe yang berada di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan daerah tersebut.

- b. Pak Eryanto sebagai Plt. Kabid Linmas menyambut baik akan rencana melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat di daerah kabupaten mempawah akan mendukung sepenuhnya rencana sosialisasi Peratudan Daerah Nomor 4 Tahun 2021.
- c. Menindaklanjuti hasil koordinasi yang dilaksanakan tanggal 19 Juni 2025 terdapat beberapa titik trotoar yang menjadi atensi pemasangan plang himbauan dilarang parkir, berjualan di trotoar yang ada di kabupaten mempawah sesuai dengan arahan Plt. Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Mempawah.

C. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam rangka Deteksi Dini terkait Kegiatan Keagamaan bertempat di Kota Pontianak, berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 905 /SATPOL.PP-B tanggal 04 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Situasi dan Kondisi yang Berpotensi Rawan Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pada Kegiatan Kepulangan Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Hasil Kegiatan :

- a. Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat pada kegiatan tersebut.
- b. Hasil temuan di lapangan :

Sebanyak 14 Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemulangan Jama'ah Haji Kalimantan Barat Tahun 2025 semua panitia telah menyiapkan semua perlengkapan dari mobil bus penjemputan ambulan penjemputan, petugas haji, petugas Kesehatan, petugas keamanan dan sarana prasarana lainnya.

Jumlah Jama'ah Haji Kalimantan Barat pada tahun 2025 berjumlah 2515 Jama'ah yang telah selesai melaksanakan haji ke Madinah.

Ada beberapa pedagang kaki lima yang di ijin berjualan di dalam area asrama haji sebanyak lima belas orang PKL yang berjualan di areal dalam hanya yang di ijin sama panitia yang tidak di ijin tidak boleh masuk di dalam area asrama haji Provinsi Kalimantan Barat.

- c. Pada Kegiatan Kepulangan Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 907 /SATPOL.PP-B tanggal 04 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Minggu - Senin, tanggal 06 – 07 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Situasi dan Kondisi yang Berpotensi Rawan Gangguan Trantibum pada Kegiatan Pemulangan Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Hasil Kegiatan :

- a. Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat pada kegiatan tersebut.

- b. Hasil temuan di lapangan :

Jama'ah Kabupaten Kubu Raya Jumlah Jama'ah 131,1 TPHI, 3 PHD. Jumlah Keseluruhan Kabupaten Kubu Raya 135 Jama'ah.

Sebanyak 309 jemaah haji dari Kabupaten Sambas 1 TPHI, 2 TKHI dan 1 KBIHU.

Semua Jama'ah Telah tiba di Asrama Haji Pontianak pada hari Minggu, 6 Juli .2025. Kepulangan mereka disambut oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kalimantan Barat.

Jemaah haji asal Kabupaten Sambas menjadi jemaah kloter perdana dari Provinsi Kalimantan Barat yang telah sampai di asrama haji pontianak kelompok terbang atau kloter 21.

Dalam sambutannya, Plh. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Kaharudin, menyampaikan rasa syukur atas kedatangan jemaah dalam keadaan sehat dan selamat di Asrama Haji Transit Pontianak setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dari Madinah.

"Kami bersyukur alhamdulillah, seluruh jemaah haji asal Sambas tiba dalam keadaan sehat wal'afiat. Ini adalah nikmat besar yang harus kita syukuri bersama sebagai rangkaian awal pelaksanaan ibadah haji. Jemaah haji Sambas akan akan pulang ke rumah masing-masing akan di antar pakai Bus Penjemputan dari pihak pengurus jama'ah haji dari kabupaten sambas.

Jama'ah haji asal Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah 135 Seluruh jemaah Kloter gelombang penerbangan Dengan Jumlah 444 Jama'ah.

Kegiatan Taggal 7 Juli kedatangan jama'ah haji dari kabupaten mempawah dengan jumlah 177, 2 PHD, 1 TPHI.

Jama'ah Kabupaten Kubu Raya 181,1 KBIHU, 1 TPHI Jumlah Keseluruhan 183

Jama'ah Kabupaten Kayong Utara Jumlah 72,Sambas 3 Melawi 1 ,1 PHD,2 TKHI, Jumlah 79 Jama'ah Dalam Penerbangan Hari Ini Dengan Jumlah 442 Jama'ah.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 918 /SATPOL.PP-B tanggal 07 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Selasa - Rabu, tanggal 08 – 09 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada Kegiatan Kepulangan Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Hasil Kegiatan :

- a. Sebanyak 149 jemaah haji dari Kota Pontianak tiba di Asrama Haji Pontianak dalam kloter 23, Kedatangan mereka disambut oleh Bapak Drs.alfian Salam,M.M. dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kalimantan Barat.
 - b. Jama'ah Kota Singkawang 108 jemaah dari rombongan Kloter 23, dan 2 PHD, 1 TPHI, 1 TKHI dan 1 KBIHU yang Pulang hari ini yang saat serah terima jemaah kepada PPIHD Provinsi Kalimantan Barat.
 - c. Sebanyak 103 jemaah Dari Kabupaten sanggau rombongan Kloter 23,.1 PHD,1 TPIHI,1 TKHI Dan Jumlah Keseluruhan dalam satu hari Kepulangan jama'ah Haji Hari Ini 368 Jama'ah.
 - d. Seluruh jemaah Kloter 23 yang pulang dari Bandara Internasional Hang Nadim Batam (Embarkasi Batam) tanggal 8 juli 2025, menggunakan maskapai Sriwijaya Air dalam dua gelombang penerbangan Dengan Jumlah 368 Jama'ah.
 - e. Kegiatan tanggal 9 masuk dalam kloter 24 meliputi Kedatangan mereka disambut oleh Bapak Drs.alfian Salam,M.M. dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang 1 PHD, 2 TPHI,2 TKHI, 1KBIHU, dengan Jumlah 249 Jama'ah.
 - f. Kabupaten Sekadau dengan jumlah 57 jama'ah.
 - g. Kabupaten Sintang ,1 TPHI, 2 PHD dengan jumlah 137 jama'ah, dengan jumlah keseluruhan jama'ah dalam satu hari dalamtiga gelombang 443 jama'ah haji.
4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 931 /SATPOL.PP-B tanggal 09 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi

Gangguan Trantibum pada Kegiatan Kepulangan Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 941 /SATPOL.PP-B tanggal 10 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kepulangan Jama'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Hasil Kegiatan :

- a. Jama'ah Kabupaten Melawi Jumlah 96 Jama'ah.
- b. Jama'ah Kota Pontianak jumlah 38 Jama'ah.
- c. Jama'ah Kabupaten Lanak Jumlah 52 Jama'ah.
- d. Jama'ah Kabupaten Sanggau Jumlah 2 Jama'ah ,pada gelombang pertama dengan jumlah 188.
- e. Jama'ah Kabupaten Bengkayang Jumlah 58 Jama'ah.
- f. Jama'ah Kabupaten Kapuas Hulu Jumlah 131 Jama'ah.

Pada gelombang kedua atau penerbangan yang terakhir jama'ah haji dengan jumlah 189 jama'ah haji dengan jumlah keseluruhan 377 jama'ah haji tergabung dalam kloter 27.

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Barat dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jemaah dalam keadaan sehat dan selamat di Asrama Haji Transit Pontianak setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dari Madinah.

"Kami bersyukur alhamdulillah, seluruh jemaah haji tiba dalam keadaan sehat wal'afiat. Ini adalah nikmat besar yang harus kita syukuri bersama sebagai rangkaian awal pelaksanaan ibadah haji.

Jemaah haji akan pulang ke rumah masing-masing akan di antar pakai Bus penjemputan dari pihak pengurus jama'ah haji dari kabupaten masing-masing.

D. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan pada Kegiatan Kerja Gubernur dan Wagub Kalbar, berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 884 /SATPOL.PP-B tanggal 1 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada Kegiatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 79 di halaman kantor gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Hasil Kegiatan :

- a. Kegiatan pada hari selasa tanggal 1 Juli 2025 dilaksanakan Upacara Hari Bhayangkara yang ke-79. Bapak Gubernur Kalimantan Barat sebagai Inspektur Upacara Di Halaman Kantor Gubernur yang di hadiri oleh Forkopimda.
 - b. Kegiatan hari ulang tahun bayangkara ke 79 di halaman kantor gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.
 - c. Kegiatan kedua Bapak Gubernur Kalbar menghadiri pelantikan pegawai (PPPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berjumlah 1220 peserta bertempat di Aula Gedung Garuda Komplek Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 977 /SATPOL.PP-B tanggal 16 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. secara resmi membuka KPID Awards 2025. Acara ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi lembaga penyiaran yang konsisten menyajikan tayangan berkualitas di tengah derasnya arus informasi digital.

Beliau menegaskan, media memiliki tanggung jawab besar sebagai penyedia informasi yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Peran KPID juga sangat strategis dalam memastikan siaran tetap sehat, bermartabat, dan bebas dari konten negatif. Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Kalbar lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan media sosial, agar ruang digital semakin positif dan konstruktif. Mari bersama-sama mendukung siaran yang berkualitas demi Kalimantan Barat yang lebih informatif, berbudaya, dan tangguh menghadapi tantangan era digital.

Pada Kegiatan Gubernur menyampaikan sambutan pada acara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Awards Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Barat Di Aula Garuda Gedung Terpadu Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 987 /SATPOL.PP-B tanggal 17 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat Di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Pada Kegiatan Gubernur Beserta Wamen PAN RB bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Samsat, tempat pelayanan SIM Polresta Pontianak, tempat pelayanan SKCK Polresta Pontianak dan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada acara Bedah Buku Aspek Hukum Tahun 2025

Pada kegiatan Gubernur Kalimantan Barat tersebut tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 988 /SATPOL.PP-B tanggal 17 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Pontianak.

Hasil Kegiatan :

- a. Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat yaitu menghadiri Kegiatan Sunat Massal dan Donor Darah bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan dihadiri oleh masyarakat Kalimantan Barat dengan antusias.

- b. Pada kegiatan Pimpinan tersebut tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung dan dilaksanakan dengan aman dan tertib.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1000 /SATPOL.PP-B tanggal 18 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu - Minggu, tanggal 19 – 20 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini

antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada Acara Pembukaan Naik Dango ke-2 Kota Pontianak Tahun 2025.

Hasil Kegiatan :

Dalam rangkaian acara hari keluarga nasional yang dilaksanakan di Pendopo berdasarkan pengawasan tidak ditemukan adanya gangguan trantibum dan acara berjalan dengan lancar sesuai prosedur dan aman sampai acara selesai.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1016 /SATPOL.PP-B tanggal 22 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada Acara Musikalisasi Puisi Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

- a. Dalam acara Musikalisasi puisi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang akan menjadi perwakilan kalbar dalam lomba nasional di Jakarta terpantau acara berjalan dengan aman dan lancar dengan terpilihnya 2 juara yang akan melaju ke event nasional
 - b. Juara 1 dan 2 juga mendapatkan uang pembinaan medali plakat voucher belanja dan kesempatan untuk berlomba dengan skala nasional sebagai perwakilan Kalimantan Barat.
7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1029 /SATPOL.PP-B tanggal 24 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada kegiatan Audiensi Oleh Forum Komunikasi Tenaga Kependidikan SMA/SMK Se-Provinsi Kalbar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Aksi " Forum Komunikasi Tenaga Pendidikan", Menuntut :

- Meminta Pemda mengusulkan formasi ke Menpan RB untuk Tenaga Honorer yang telah mengikuti serangkaian tes PPPK Tahap II kategori (R4) di instansi asal bekerja.
- Meminta Pemerintah Daerah memberikan payung hukum untuk tenaga honorer yang masih aktif bekerja yang karena tidak bisa melanjutkan untuk

tes disebabkan TMS pada saat melamar CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2024.

- Meminta Pemerintah untuk mengusulkan tenaga Honorer yang kategori R4 untuk mengisi jabatan ASN / PPPK sesuai dengan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024 dan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Pada pukul 10.45 massa aksi Unras membubarkan diri masing-masing tanpa ada gangguan trantibum.

8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1037 /SATPOL.PP-B tanggal 25 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 25 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Dalam Kegiatan Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Ikaatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Kalbar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Hasil temuan di lapangan

- a. Agenda: pelantikan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Kalimantan Barat Masa Bakti 2025-20230. Bertempat di Pendopo Gubernur Kalbar.
- b. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.I.P., M.Si. menghadiri acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Kalimantan Barat masa bakti 2025-2030, yang digelar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada Jumat (25/7/2025). Krisantus berharap IKAL Kalimantan Barat dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat.

Pejabat Yang Hadiri:

1. Wakil Gubernur Kalimantan Barat
2. Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Barat
4. Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL)
5. Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL)
6. Ketua Umum DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Kalbar

Jumlah tamu yang hadir: 120 orang.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1040 /SATPOL.PP-B tanggal 25 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional dan Pelantikan Pengurus KAHMI di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Hasil temuan di lapangan :

Gubernur Kalimantan Barat, -Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. H.Harisson, M.Kes., menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 di Pendopo Gubernur Kalbar,

Dengan penuh semangat dan antusiasme dari ratusan pelajar tingkat SMP yang hadir Gubernur Ria Norsan hadir memberi semangat kepada anak anak yang telah menunggu kehadiran orang nomor satu di Kalimantan Barat tersebut. Acara ini mengusung tema nasional "Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045", yang menggambarkan pentingnya peran anak dalam membangun masa depan bangsa.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat, Drs.H. Ria Norsan, M.M., M.H., dalam sambutannya menekankan bahwa anak adalah aset bangsa sekaligus amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan dididik dengan penuh kasih sayang, nilai moral, serta tanggung jawab. Anak-anak adalah titipan Allah SWT. Mereka bisa menjadi jalan menuju surga atau sebaliknya. Maka orang tua wajib hadir dan mendidik anak dengan akhlak, pendidikan, dan kasih sayang," tegas Ria Norsan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Ny. Dr. Hj. Erlina, SH., MH, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak APKASI. dan

Dalam sambutannya, Erlina mengingatkan pentingnya peran keluarga, terutama ibu, dalam pengawasan tumbuh kembang anak, serta menjauhkannya dari perilaku bullying dan pergaulan negatif.stop bullying! Ajak anak bicara, buka tas mereka setelah pulang sekolah, dan perhatikan dengan siapa mereka berteman. Usia SMP adalah usia yang rawan, dan mereka butuh pendampingan lebih dari orang tua," kata Erlina.

Peringatan Hari Anak Nasional ke-41 di Kalimantan Barat menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran krusial anak-anak sebagai aset bangsa dan fondasi Indonesia Emas 2045. Melalui penekanan Gubernur Ria Norsan dan Ketua TP-PKK Erlina pada pentingnya pendidikan karakter, pengawasan orang tua, dan kasih sayang yang tulus, diharapkan setiap anak di Kalimantan Barat dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan positif. Sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi hebat yang siap membawa bangsa menuju masa depan gemilang.

10. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1062 /SATPOL.PP-B tanggal 29 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan berkunjung ke rumah calon siswa Sekolah Rakyat di Pontianak. Kunjungi dilakukan Ria Norsan bersama dengan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono untuk melihat secara langsung bagaimana kehidupan siswa yang nantinya akan menimba ilmu di Sekolah Rakyat tersebut.

Orang nomor satu di Kalbar itupun menyebut, nantinya akan ada 25 calon siswa maupun siswi di tingkat Sekolah Dasar (SD), 20 di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 40 di Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk yang SMS nantinya akan dibagi menjadi dua kelas.

Perekrutan sendiri terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, artinya penghasilan orang tuanya tidak sampai 1 juta perbulan itu yang menjadi prioritas dan situasi keadaannya memang benar-benar tidak mampu.

Kita juga merekrut tidak memandang suku agama semuanya tetap kita rekrut semuanya kita perlakukan sama. Untuk kunjungan kalau hari libur boleh berkunjung untuk orang tua kalau hari-hari sekolah mungkin dibatasi," pungkasnya.

11. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1082 /SATPOL.PP-B tanggal 31 Juli 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Gedung Rektorat Universitas Tanjung Pura.

Hasil Kegiatan :

Universitas Tanjungpura (UNTAN) dipercaya menjadi tuan rumah dalam acara Pertemuan Sela Komunikasi (Forkom) Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Negeri Se-Indonesia tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Tanjungpura pada tanggal 31 Juli – 3 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri Bapak Gubernur ,forkopinda, Dekan, Wakil Dekan, sampai tingkat program studi dari 34 perwakilan Perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana, Bapak M. Basri menyampaikan " saat ini

telah terkonfirmasi 156 orang peserta yang hadir dari seluruh perwakilan anggota Forkom. Kegiatan dilaksanakan dengan rangkaian agenda kegiatan diantaranya, Dialog Nasional, Rapat Pimpinan, kunjungan budaya dan wisata di Kota Pontianak".

Dr. Ahmad Yani, T, M.Pd, Dekan FKIP UNTAN menyambut baik terselenggaranya pertemuan ini di Pontianak. "bagi Kami, kesempatan ini merupakan penghargaan yang besar dari para Pimpinan FKIP Negeri Seluruh Indonesia.

Harapannya, dapat memberikan kesan yang mendalam pada untuk kemajuan Pendidikan Nasional." menguatkan peran FKIP menjadi wadah dalam mengawal kualitas Tenaga Pendidikan yang bermutu. Terima Berbagai pihak Pada Kegiatan Bapak Gubernur Memberikan Sambutan Sekaligus Membuka Pertemuan Sela Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia Di Universitas Tanjungpura Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

12. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1089 /SATPOL.PP-B tanggal 1 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 1 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalbar. Dalam apel tersebut, Hanif menegaskan pentingnya solusi permanen dalam pengendalian Karhutla, sebagaimana arahan Presiden RI. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama karena pengendalian Karhutla berkontribusi besar terhadap pengurangan emisi. Ia menekankan perlunya pemahaman menyeluruh dan kesiapsiagaan agar saat Karhutla terjadi, upaya penanggulangannya bisa lebih efektif. Keterpaduan, sinergi, dan aksi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pengendalian Karhutla," tegas Hanif.

Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat Indonesia mengalami bencana Karhutla besar pada 1981/1982, 1997/1998, 2007, 2013, 2015, 2019, dan 2023. Intensitasnya bervariasi tergantung kondisi El-Nino maupun La-Nina. Secara nasional, data per 1 Januari hingga 30 Juni 2025 menunjukkan

983 kejadian Karhutla dengan luas terbakar sekitar 8.594 hektare berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI). Peristiwa ini tersebar di berbagai provinsi seperti Aceh, Riau, Jambi, Kalbar, hingga Kaltim.

Khusus di Kalimantan Barat, hingga 31 Juli 2025, tercatat 1.500 hotspot dan 258 kejadian Karhutla dengan luas terbakar mencapai 989 hektare. Kondisi ini masih berlangsung meskipun hujan sempat turun pada 1 Agustus.

BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juni dan akan berlangsung hingga Agustus 2025. Artinya, Kalbar harus terus siaga untuk mengantisipasi kebakaran yang dapat menimbulkan asap dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kalimantan Barat sendiri memiliki luas sekitar 14,7 juta hektare, dengan 2,7 juta hektare berupa lahan gambut yang sangat rentan terbakar.

13. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1090 /SATPOL.PP-B tanggal 1 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Apel Siaga Pelepasan Pasukan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Pada Apel yang di laksanakan pada hari Sabtu yang dihadiri oleh Forkopimda juga dihadiri oleh anggota terdiri dari TNI, Kepolisian, BNPP, BPDP, dan Juga Pemadam Pemerintahan dan juga melibatkan Pemadam Swasta sukarela dari Masyarakat, dinyatakan siap dan bersinergi dalam menjaga dan memelihara untuk tidak berkelanjutan masalah kabut asap di Kalimantan Barat dimana factor utama atau terbesar nya adalah pembukaan lahan dengan cara dibakar tanpa diawasi atau metode yang aman.

Sehingga dampak dari pembakaran menjadi luas dan menyebar dikarenakan tidak terkontrol atau menggunakan metode yang salah, oleh karena itu unsur pihak pengamanan menghimbau agar masyarakat lebih bijak dalam melakukan upaya pembukaan lahan secara mandiri sehingga tidak merugikan kahlayak luas terkhusus masyarakat Kalimantan barat.

14. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1091 /SATPOL.PP-B tanggal 1 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Puncak Literasi Anak Kalbar 2025 yang diinisiasi OJK Kalbar, Gubernur Kalbar mendorong agar anak-anak dibiasakan menabung, baik lewat celengan maupun di bank, sebagai langkah membentuk generasi mandiri, disiplin, dan cerdas finansial.

Kalimantan Barat bahkan meraih predikat Wilayah Implementasi Terbaik program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dengan lebih dari 869 ribu pelajar sudah memiliki rekening tabungan.

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. membuka secara resmi Kampanye Ayo Menabung & Puncak Literasi Anak Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Kegiatan ini mengusung tema "Cerdas Menabung untuk Indonesia Emas dan Gemilang" kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan anak-anak sejak dini, serta meningkatkan pemahaman mereka dalam memanfaatkan layanan keuangan formal secara bijak.

15. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1108 /SATPOL.PP-B tanggal 5 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

- a. Hasil temuan di lapangan

Kick Off Program KEJAR Masif dan Cerdas Berinvestasi Pasar Modal 2025 digelar OJK Kalbar di Aula Garuda, Selasa (5/8), untuk tingkatkan literasi dan inklusi keuangan pelajar. Sekda Prov Kalbar dr. H. Harisson, M.Kes. mendorong edukasi sejak dini, sementara OJK menargetkan 1 juta rekening pelajar aktif demi wujudkan generasi muda cerdas finansial.

b. Pada Kegiatan Acara KICK OFF KEJAR Masif Dan Cerdas Berinvestasi di Gedung Garuda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Tidak Ditemukan Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Tersebut Berjalan Aman Dan Lancar

16. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1109 /SATPOL.PP-B tanggal 5 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Dalam rangka peringatan HUT RI ke-80, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Ceramah Hukum bertema "Penguatan ASN dalam Pengadaan Barang dan Jasa".

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Para ASN dibekali pemahaman menyeluruh terkait aturan dan proses pengadaan, agar terhindar dari potensi pelanggaran hukum serta mampu menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas.

Gubernur Kalbar menyampaikan bahwa ASN perlu berhati-hati dalam bekerja dan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa ASN yang bekerja sesuai aturan akan mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah provinsi.

Dengan ASN yang taat aturan dan memiliki integritas tinggi, pengelolaan anggaran publik diharapkan semakin tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Pada Kegiatan Gubernur pada acara ceramah hukum dengan tema penguatan ASN dalam pengadaan barang dan jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

17. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1117 /SATPOL.PP-B tanggal 6 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi meluncurkan logo dan maskot MTQ ke-33 tingkat Provinsi Kalbar sebagai penanda dimulainya rangkaian kegiatan menuju pelaksanaan MTQ tahun 2025.

Tahun ini, Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai tuan rumah. MTQ akan digelar pada 14-20 September 2025 di Kota Putussibau, dan diikuti oleh peserta dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa MTQ bukan hanya soal lomba membaca Al-Qur'an, tetapi juga bagian dari syiar Islam yang memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral di tengah masyarakat

Dengan semangat kebersamaan, mari kita sukseskan MTQ Kalbar ke-33 sebagai ajang syiar dan silaturahmi antardaerah.

Pada Kegiatan Acara Ekspose Persiapan Pelaksanaan MTQ XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

18. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1134 /SATPOL.PP-B tanggal 8 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 8 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Perayaan budaya terbesar di Kalimantan Barat bertajuk "Gemilang Budaya Kalimantan Barat 2025" kembali digelar! Acara tahunan yang dinantikan masyarakat ini akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 16 Agustus 2025, menghadirkan beragam lomba, pertunjukan, pameran, hingga karnaval budaya yang memukau. Diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, acara ini menjadi ajang apresiasi dan pelestarian warisan budaya lokal.

Berlokasi di beberapa titik strategis seperti Museum Provinsi Kalbar dan Taman Budaya, acara ini mengundang partisipasi luas dari masyarakat, komunitas seni, dan pelajar. Sejumlah kegiatan unggulan akan mewarnai perayaan tahun ini, di antaranya Lomba Pangka' Gasing pada Jumat, 8 Agustus, yang akan membuka rangkaian kegiatan dengan nuansa permainan tradisional yang semakin langka di kalangan generasi muda. Keesokan harinya, pada 9 Agustus, masyarakat akan disuguhkan Lomba Tari Kreasi dan Lomba Terompah, yang menampilkan kolaborasi antara tradisi dan kreativitas kontemporer. Tak hanya perlombaan, pameran budaya juga akan menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari Pameran Temporer Museum (8-13 Agustus) hingga Pameran OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan) yang berlangsung pada

8-10 Agustus, semuanya tersaji di Museum Provinsi Kalbar. Pameran ini membuka ruang bagi pengunjung untuk lebih mengenal kekayaan budaya Kalimantan Barat secara lebih dekat dan edukatif.

Puncak kemeriahan akan terjadi pada Minggu, 10 Agustus, lewat dua acara besar: Parade Baju Adat Kreasi & Busana Karnaval dan Karnaval Budaya. Dengan rute dari Kantor Gubernur Kalbar hingga Museum Provinsi Kalbar, parade ini diprediksi akan menyedot perhatian publik. Ribuan peserta dari berbagai kabupaten/kota dipastikan hadir membawa kekhasan budaya masing-masing.

Kegiatan budaya lainnya yang juga menarik adalah Lomba Kuliner Kalbar pada Senin, 11 Agustus. Lomba ini akan menjadi ajang eksplorasi kekayaan kuliner tradisional dari berbagai etnis yang mendiami Kalimantan Barat. Sementara itu, Lomba Tarung Pusi yang digelar pada 15-16 Agustus di Taman Budaya akan menjadi ruang bagi para penyair muda mengekspresikan gagasan dan cinta mereka terhadap budaya.

Dengan mengangkat semangat "Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju", Gemilang Budaya Kalimantan Barat tahun ini juga bertepatan dengan semarak Hari Kemerdekaan RI ke-80. Perpaduan antara semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya daerah menjadikan festival ini semakin bermakna.

19. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1135 /SATPOL.PP-B tanggal 8 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri Anniversary ke-6 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalbar di Pendopo Gubernur. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan apresiasi atas komitmen IJTI Kalbar yang terus menghadirkan informasi berimbang, mendidik, dan membangun, di tengah derasnya arus informasi dan tantangan disinformasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa jurnalis televisi memiliki peran penting sebagai benteng demokrasi dan penyambung aspirasi publik. Ia meminta agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar akurat, telah dicek kebenarannya, dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Beliau juga mengajak seluruh insan media untuk menjaga profesionalisme, integritas, serta membangun sinergi bersama pemerintah demi Kalimantan Barat yang lebih terbuka, berdaya saing, dan berkeadilan.

Kegiatan Bapak Gubernur Kedua

Dalam kesempatan tersebut, beliau menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan awal dari komitmen bersama untuk

membangun Kalimantan Barat melalui program yang nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Beliau juga mengapresiasi semangat para pengurus yang siap bersinergi dengan pemerintah, terbuka menyampaikan aspirasi, dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan. Dengan dukungan penuh pemerintah, Pemuda Katolik diharapkan mampu menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Kalbar yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

20. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1136 /SATPOL.PP-B tanggal 8 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Kegiatan Gemilang Budaya di Museum Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Karnaval Gemilang Budaya Kalimantan Barat 2025 yang diikuti sekitar 2.000 peserta.

Mengusung tema Gemilang Budaya Kalimantan Barat 2025, kegiatan ini menghadirkan beragam lomba, parade, pertunjukan seni, hingga pameran UMKM. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana memperkuat rasa kebangsaan sekaligus melestarikan budaya. Menurutnya, Kalimantan Barat adalah simbol keberagaman yang patut dijaga bersama.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta, terutama para pelajar yang ikut berpartisipasi. Kegiatan ini juga menjadi ajang kompetisi dengan penilaian dan hadiah yang cukup besar, sehingga diharapkan setiap peserta dapat tampil maksimal, kreatif, dan penuh semangat.

Gubernur Ria Norsan berharap karnaval ini menjadi pendorong semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya di tengah keberagaman Indonesia. Ia mengajak generasi muda untuk menjadi generasi emas 2045 yang siap membawa Indonesia lebih maju dengan tetap melestarikan budaya dan menjaga persatuan.

21. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1167 /SATPOL.PP-B tanggal 14 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kalbar dengan agenda Penandatanganan Fakta Integritas KUA-PPAS RAPBD Tahun 2026, Penandatanganan Perubahan KUA-PPAS RAPBD Tahun 2025, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub menegaskan pentingnya kolaborasi Pemerintah Provinsi bersama DPRD untuk menggali potensi Kalbar yang begitu luas, mulai dari sektor perkebunan, pertambangan, hingga infrastruktur, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beliau juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, terutama di jalur transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Dengan sinergi dan kerja bersama, Kalbar diharapkan terus berkembang dan semakin berdaya saing.

22. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1180 /SATPOL.PP-B tanggal 15 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Penaikan dan Penurunan Bendera di TMP Patria Jaya Adisucipto Kubu Raya.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., menjadi Inspektur Apel Kehormatan dan Renungan Suci adalah upacara yang digelar di Taman Makam Pahlawan pada malam menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus bertempat di TMP Dharma Patria Jaya Adisucipto Kubu Raya, pada Sabtu malam (16/8/2025). Upacara ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Apel kehormatan tersebut diawali dengan pemberian penghormatan secara bersama sama kemudian para pimpinan memasuki tempat upacara.

Dalam apel kehormatan itu juga Gubernur Ria Norsan membacakan Naskah Apel Kehormatan yang mana isi naskah tersebut berisi pernyataan hormat atas pengorbanan para pahlawan dan janji untuk melanjutkan perjuangan mereka.

Dan apel tersebut diakhiri dengan penyalaan Obor yang dinyalakan sebagai simbol semangat perjuangan pahlawan kemudian ditutup dengan doa.

Upacara turut dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Sekda Prov Kalbar, jajaran Forkopimda Kalbar, berbagai unsur Perwakilan pemerintah daerah, TNI/Polri, Tokoh masyarakat, Pelajar, dan unsur-unsur lainnya.

23. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1181 /SATPOL.PP-B tanggal 15 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Penaikan dan Penurunan Bendera di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H, bertindak sebagai Inspektur dalam Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (17/8/2025).

Upacara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S, IP, M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H.Harisson, M.Kes, Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Kalbar, Ny. Donata Dirasig, Ketua Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., Jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, para Pejabat TNI/Polri, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), serta para tokoh Kalimantan Barat.

Usai menjadi Inspektur Upacara, saat ditemui awak media Gubernur Ria Norsan menyampaikan pesannya pentingnya di Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke - 80.

Sudah 80 Tahun Indonesia Merdeka, artinya 80 tahun adalah usia yang tidak cukup muda, untuk itu Mari Kita Maknai Kemerdekaan ini dengan membangun Indonesia sesuai dengan kemampuan kita, dan berbuat untuk Indonesia sesuai dengan kemampuan kita. Berdasarkan slogan Hari Kemerdekaan RI ke 80 yaitu Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, Mudah-mudahan hal itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari". Ungkap Gubernur Ria Norsan.

Kemudian, kepada para generasi muda Gubernur Ria norsan menuturkan bahwa Kemerdekaan tidak diperoleh secara mudah, melainkan dengan perjuangan yang sulit, sengit hingga pertumpahan darah, pengorbanan harta dan nyawa. Mari semua generasi muda, kita hargai Kemerdekaan yang telah diperoleh oleh Para Pahlawan kita dengan mengisi Kemerdekaan ini dengan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing", pesannya.

24. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1204 /SATPOL.PP-B tanggal 22 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Kunjungan Wakil Presiden di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Dalam rangka kegiatan kunker Wapres di Pontianak dilakukan deteksi dini di rute perjalanan dan dilokasi kunjungan, untuk rute dilakukan pengamanan dari Bandara Supadio Sampai Jalan Ahmad Yani, Untuk lokasi kunjungan wapres dari bandara bergerak ke Ayani mengunjungi Gramedia di Mega Mall dan Beristirahat di hotel Mercure kemudian di esok hari nya berkunjung ke Pasar Flamboyan.

Dalam sepanjang perjalanan kunjungan kerja tidak ditemukan adanya gangguan atau trantibum pada kegiatan Wakil Presiden.

25. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1205 /SATPOL.PP-B tanggal 22 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Kunjungan Wakil Presiden di Patih Patinggi Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan didampingi Bupati Mempawah Dr.Hj. Erlina, SH.,M.H., beserta Forkopimda Kalbar mengunjungi Desa Sepang, Kecamatan Toho, Mempawah. Acara tersebut menjadi momen berharga bagi masyarakat di wilayah tersebut karena turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Kunjungan Wapres ini dalam rangka meninjau dan mensosialisasikan sejumlah program nasional yang kini mulai digulirkan di daerah, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan inisiatif Ketahanan Pangan.

Pak Wapres hadir atas undangan Panglima Jilah, sekaligus dalam rangka memastikan program-program nasional, Asta Cita, berjalan baik di Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Mempawah ini,"

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembangunan berkelanjutan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung setiap program yang telah dicanangkan demi kemajuan daerah.

Panglima Jilah juga mengucapkan terima kasih atas program pemerintah yang sudah masuk ke daerahnya, seperti pengobatan gratis hingga makan bergizi gratis (MBG).Dia mengaku bersyukur memiliki wakil presiden yang mau mengunjungi masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan ini," pungkasnya.

Sementara itu, Wapres Gibran yang hadir secara langsung pada acara itu mengajak kepada para masyarakat Dayak untuk selalu mengawal dan mendukung program pemerintah agar semuanya berjalan baik.Bapak ibu sekalian, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden sangat berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan, jadi pembangunan itu tidak hanya Jawa sentris saja akan tetapi harus menyentuh kepada seluruh wilayah di Indonesia,"

26. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1206 /SATPOL.PP-B tanggal 22 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. hadir dalam peringatan Milad ke-8 Satria Pembela Melayu sekaligus pelantikan pengurus kabupaten/kota se-Kalbar di Pendopo Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan bahwa delapan tahun perjalanan organisasi ini bukanlah waktu yang singkat. Banyak dinamika yang telah dilalui, dan dari sanalah tumbuh semangat kebersamaan, keikhlasan, serta komitmen untuk menjaga marwah Melayu dan melestarikan budaya.

Gubernur Ria Norsan juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Satria Pembela Melayu yang terus menjaga harmoni masyarakat, mempererat silaturahmi, sekaligus menjadi benteng moral dan sosial bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

Beliau berharap semangat yang dibawa oleh organisasi ini dapat terus menjadi energi positif dalam membangun masyarakat yang berbudaya, bersatu, dan bermanfaat bagi Kalbar serta Indonesia.

27. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1225 /SATPOL.PP-B tanggal 26 Agustus 2025, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Sebanyak 41 Pejabat Administrator resmi dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam pengisian jabatan struktural sekaligus penguatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemprov Kalbar.

Gubernur menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, komitmen, dan rasa tanggung jawab. Para pejabat yang baru dilantik juga diingatkan untuk segera beradaptasi, bekerja profesional, serta menjaga birokrasi yang bersih dan berintegritas.

Dengan semangat baru, diharapkan roda pemerintahan Kalbar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

28. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1289 /SATPOL.PP-B tanggal 4 September 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan tersebut, beliau mengajak umat Islam untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai fondasi dalam memperkuat persaudaraan, menebar kasih sayang, dan membangun Kalimantan Barat yang penuh keberkahan.

Melalui zikir dan doa bersama, Gubernur berharap Kalbar senantiasa diberi ketenangan, keselamatan, serta dijauhkan dari berbagai cobaan.

Teladan Nabi Muhammad SAW menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kepedulian sosial sangat relevan untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri rapat paripurna DPRD Kalbar dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD 2025. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui penetapan Ranperda menjadi Perda.

Gubernur Ria Norsan optimis, disahkannya APBD Perubahan ini akan menjadi dorongan penting dalam percepatan pembangunan di Bumi Khatulistiwa.

Fokus utama diarahkan pada penyelesaian pekerjaan yang belum tuntas, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan sekolah-sekolah di daerah pedalaman.

Meski dihadapkan pada tantangan defisit akibat perubahan kebijakan dan pemotongan transfer pusat, Pemprov Kalbar tetap berkomitmen untuk berinovasi meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Salah satunya melalui program inovatif GOKATAN, yang memudahkan masyarakat membayar pajak cukup di tingkat kecamatan.

Dengan dukungan penuh DPRD Provinsi Kalbar, disahkannya APBD Perubahan ini menjadi tonggak penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada Kegiatan Acara Maulid Nabi Muhammad Saw Di Kanwil Kementrian Agama prov Kalbar dan Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Barat Di Gedung DPRD Kalimantan Barat tidak ada ditemukan potensi gangguan trantibun Selama Kegiatan Tersebut.

29. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1290 /SATPOL.PP-B tanggal 4 September 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Dalam Kunjungan DPRD Kaltim di Gedung Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Dalam kunjungan Anggota Dewan DPRD Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Anggota Komisi V bermaksud menjalin silaturahmi dan membahas beberapa program kerjasama yang akan di jalin dengan Pemprov Kalimantan Barat.

Untuk anggota dewan perwakilan DPRD Provinsi Kalbar diwakili oleh masing2 fraksi dan dihadiri oleh Asisten 3 Bapak Alfian, adapun selama kegiatan dan rapat berlangsung tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum sehingga acara bisa berjalan dengan lancar dan tujuan dan maksud bisa tersampaikan dengan jelas. Dengan ada nya kesepakatan perjanjian ini diharapkan kedepan nya bisa membawa dampak yang positif untuk masing2 daerah.

30. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1355 /SATPOL.PP-B tanggal 19 September 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 19 September 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada Acara Maulid Akbar Yang di Hadiri Oleh Ustad Das'ad Latif dan Bapak Gubernur Kalimantan Barat di Taman Alun-Alun Kapuas Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

Ribuan warga memadati Taman Alun-Alun Kapuas untuk menghadiri Maulid Akbar bersama Ustadz Das'ad Latif.

Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan bersama Hj. Erlina ini berlangsung penuh hikmah, diawali lantunan nasyid Haddad Alwi hingga ditutup penampilan Wali Band.

Gubernur Ria Norsan mengajak masyarakat untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Pesan yang sejalan juga disampaikan Ustadz Das'ad Latif, tentang cinta kepada Nabi, menghormati ulama, menjaga adab, serta tetap sabar menghadapi ujian hidup.

31. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1356 /SATPOL.PP-B tanggal 19 September 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada Pengukuhan Pengurus Provinsi PERSINAS AKAD Kalimantan Barat Masa Bhakti 2025 - 2030 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat

Hasil Kegiatan :

PERSINAS ASAD Kalbar periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Pendopo Gubernur Kalbar. Momentum ini menjadi langkah penting untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus menjaga kelestarian pencak silat sebagai warisan budaya bangsa.

Dalam arahnya, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus yang baru. Ia menegaskan bahwa sebuah organisasi tidak akan berjalan baik tanpa kekompakan, sehingga penting untuk terus menjunjung kebersamaan dan semangat gotong royong.

Beliau juga menekankan bahwa pencak silat bukan sekadar olahraga, melainkan identitas budaya yang patut dibanggakan. Melalui kepengurusan baru ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kalbar di tingkat nasional hingga internasional.

32. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1366 /SATPOL.PP-B tanggal 22 September 2025, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 September 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum pada Pelantikan Pimpinan Wilayah Ikatan Nahdlatul Ulama (PW. IBNU) Provinsi Kalimantan Pendopo Gubernur Kalimantan Barat

Hasil Kegiatan :

Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat pada kegiatan tersebut.

Hasil temuan di lapangan

Pelantikan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur Kalbar. Kehadiran ini menjadi wujud silaturahmi sekaligus dukungan terhadap peran generasi muda, khususnya pelajar, dalam membangun karakter kebangsaan serta meningkatkan partisipasi demokrasi di daerah yang di buka oleh Asisten 3 Provinsi Kalimantan Barat.

E. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum di Aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1324 /SATPOL.PP-B tanggal 12 September 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Senam Segar Rasa dan Syukuran HUT FKPPi ke 47 Pengurus Daerah XV KB FKPPi di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Sosialisasi senam segarasa gema emas 2025 dan display olahraga Masyarakat kaliantan barat yang di hadiri oleh bapaak sekda dan para kepala dinas dan peserta sebam dari asn perwakilan dari semua kantor dan dari danggar sanggar senam yang ada di pontinak di halaman Gedung olahraga terpadu a yani Pontianak.

Wagub Krisantus menegaskan bahwa perjalanan panjang FKPPi merupakan bukti konsistensi organisasi ini dalam menjaga nilai kebangsaan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kalbar.

Tantangan era digital, mulai dari hoaks hingga polarisasi, yang bisa mengganggu harmoni sosial. Untuk itu, Krisantus menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan TNI-Polri demi terciptanya kedamaian dan kemajuan daerah.

Pada Kegiatan syukuran HUT FKPPi ke 47 Pengurus Daerah XV KB FKPPi di Pendopo Provinsi Kalimantan barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 1398 /SATPOL.PP-B tanggal 26 September 2025, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2025 Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pertandingan Pencak Silat Memperebutkan Piala Gubernur di Gor Terpadu Ayani

Hasil Kegiatan :

Adapun kejuaraan ini dilaksanakan di Area Gor Terpadu Ahmad Yani dengan cabang oilah raga pencak silat memperebutkan piala Gubernur Kalimantan

Barat, bapak Gubernur tiba di lokasi jam 8 malam dan membuka acara tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan atlet silat baru di provinsi Kalimantan barat dan demi menjaga warisan budaya olah raga pencak silat dikalimantan barat.

Dengan adanya kejuaraan ini diharapkan warisan leluhur untuk olah raga pencak silat tetap terjaga serta bisa melahirkan generasi baru yang bisa membawa nama baik Kalimantan barat di skala nasional terlebih internasional

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	287.972.900,-	247.072.926,-	85,79 %

Sumber data : SIPD

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2025 sebesar Rp. 287.972.900,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan pada Triwulan III telah direalisasikan sebesar Rp. 247.072.926,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 85,79 %. Hal ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (anggaran kas).

BAB III
HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2025

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Laporan	3 Laporan	75 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi sebanyak 3 (tiga) laporan atau sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen)

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

- a. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi yaitu belum optimal koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk memperoleh data dan informasi peta potensi rawan konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.
- b. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan instansi terkait baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, *stakeholder* maupun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2025, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, 7 Oktober 2025

Mengetahui:

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,


EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19820814 200604 2 009

Plt. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,


HARYATMIN, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 19761005 199803 1 008

DOKUMENTASI KEGIATAN

A. DOKUMENTASI KEGIATAN



B. REKAP SURAT PERINTAH TUGAS

NO	SPT	HARI/ WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
1	No. 300.1/ 884/SATPOL.PP-B Tanggal 1 Juli 2025	Selasa, 1 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.	SATPOL PP	9 Orang	Kota Pontianak
2	No. 300.1/ 900/SATPOL.PP-B Tanggal 3 Juli 2025	Jumat, 4 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kabupaten Mempawah	SATPOL PP	8 Orang	Kota Mempawah
3	No. 300.1/ 905/SATPOL.PP-B Tanggal 4 Juli 2025	Sabtu, 5 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kepulangan Jamaah Haji Kalbar 1446 H di Asrama Haji Pontianak.	SATPOL PP	4 Orang	Kota Pontianak
4	No. 300.1/ 907/SATPOL.PP-B Tanggal 4 Juli 2025	Minggu- Senin, 6-7 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kepulangan Jamaah	SATPOL PP	16 Orang	Kota Pontianak

			Haji Kalbar 1446 H di Asrama Haji Pontianak.				
5	No. 300.1/ 918/SATPOL.PP-B Tanggal 7 Juli 2025	Selasa- Rabu, 8-9 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kepulangan Jamaah Haji Kalbar 1446 H di Asrama Haji Pontianak.	SATPOL PP	16	Orang	Kota Pontianak
6	No. 300.1/ 931/SATPOL.PP-B Tanggal 9 Juli 2025	Kamis, 10 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kepulangan Jamaah Haji Kalbar 1446 H di Asrama Haji Pontianak.	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
7	No. 300.1/ 941/SATPOL.PP-B Tanggal 10 Juli 2025	Jumat, 11 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kepulangan Jamaah Haji Kalbar 1446 H di Asrama Haji Pontianak.	SATPOL PP	15	Orang	Kota Pontianak

8	No. 300.1/ 977/SATPOL.PP-B Tanggal 16 Juli 2025	Rabu, 16 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
9	No. 300.1/ 987/SATPOL.PP-B Tanggal 17 Juli 2025	Kamis, 17 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
10	No. 300.1/ 988/SATPOL.PP-B Tanggal 17 Juli 2025	Jumat, 18 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Sunat Masal dan Donor Darah di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
11	No. 300.1/ 1000/SATPOL.PP-B Tanggal 18 Juli 2025	Sabtu 19 Juli - Minggu 20 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Hari Keluarga Nasional di	SATPOL PP	15	Orang	Kota Pontianak

			Pendopo Gubernur Kalimantan Barat				
12	No. 300.1/ 1001/SATPOL.PP-B Tanggal 18 Juli 2025	Senin, 21 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Damai Aliansi Kalimantan Barat Mengundang di Kantor Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	16	Orang	Kota Pontianak
13	No. 300.1/ 1016/SATPOL.PP-B Tanggal 22 Juli 2025	Selasa, 22 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Musikalisasi Puisi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
14	No. 300.1/ 1024/SATPOL.PP-B Tanggal 23 Juli 2025	Rabu, 23 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Musikalisasi Puisi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak

			Tahun 2025 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat				
15	No. 300.1/ 1029/SATPOL.PP-B Tanggal 24 Juli 2025	Kamis, 24 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Audiensi Oleh Forum Komunikasi Tenaga Kependidikan SMA/ SMK/ SLB Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	16	Orang	Kota Pontianak
16	No. 300.1/ 1037/SATPOL.PP-B Tanggal 25 Juli 2025	Jumat, 25 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Kalimantan Barat Masa Bhakti 2025 - 2030 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak

17	No. 300.1/ 1040/SATPOL.PP-B Tanggal 25 Juli 2025	Sabtu, 26 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Dan Pelantikan Pengurus KAHMI Di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
18	No. 300.1/ 1062/SATPOL.PP-B Tanggal 29 Juli 2025	Selasa, 29 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
19	No. 300.1/ 1067/SATPOL.PP-B Tanggal 29 Juli 2025	Rabu, 30 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Damai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
20	No. 300.1/ 1082/SATPOL.PP-B Tanggal 31 Juli 2025	Kamis, 31 Juli 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak

			Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se- Indonesia di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak				
21	No. 300.1/1089/SATPOL.PP-B Tanggal 1 Agustus 2025	Jumat, 1 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
22	No. 300.1/1090/SATPOL.PP-B Tanggal 1 Agustus 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Apel Siaga Pelepasan Pasukan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
23	No. 300.1/1091/SATPOL.PP-B Tanggal 1 Agustus 2025	Minggu, 3 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak

24	No. 300.1/ 1108/SATPOL.PP-B Tanggal 5 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak	SATPOL PP	11	Orang	Kota Pontianak
25	No. 300.1/ 1109/SATPOL.PP-B Tanggal 5 Agustus 2025	Rabu, 6 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.	SATPOL PP	11	Orang	Kota Pontianak
26	No. 300.1/ 1117/SATPOL.PP-B Tanggal 6 Agustus 2025	Kamis, 7 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak
27	No. 300.1/ 1134/SATPOL.PP-B Tanggal 8 Agustus 2025	Jumat, 8 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gemilang Budaya di Museum Negeri Kalimantan Barat	SATPOL PP	17	Orang	Kota Pontianak

28	No. 300.1/ 1135/SATPOL.PP-B Tanggal 8 Agustus 2025	Sabtu, 9 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	13	Orang	Kota Pontianak
29	No. 300.1/ 1136/SATPOL.PP-B Tanggal 8 Agustus 2025	Minggu, 10 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gemilang Budaya Kalimantan Barat Tahun 2025 di Museum Negeri Kalimantan Barat	SATPOL PP	16	Orang	Kota Pontianak
30	No. 300.1/ 1160/SATPOL.PP-B Tanggal 13 Agustus 2025	Rabu, 13 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
31	No. 300.1/ 1167/SATPOL.PP-B Tanggal 14 Agustus 2025	Kamis, 14 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak

			Kalimantan Barat di Kota Pontianak.				
32	No. 300.1/ 1180/SATPOL.PP-B Tanggal 15 Agustus 2025	Sabtu, 16 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Konser Kemerdekaan RI Ke-80 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Patria Jaya	SATPOL PP	13	Orang	Kota Pontianak
33	No. 300.1/ 1181/SATPOL.PP-B Tanggal 15 Agustus 2025	Minggu, 17 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-80 Di Kantor Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
34	No. 300.1/ 1204/SATPOL.PP-B Tanggal 22 Agustus 2025	Jumat, 22 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak

			Pada Kegiatan Kedatangan Wakil Presiden RI Di Kota Pontianak				
35	No. 300.1/1205/SATPOL.PP-B Tanggal 22 Agustus 2025	Sabtu, 23 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI Di Patih Patinggi Desa Sepang Kec Toho Kab Mempawah	SATPOL PP	10	Orang	Kab Mempawah
36	No. 300.1/1206/SATPOL.PP-B Tanggal 22 Agustus 2025	Sabtu, 23 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
37	No. 300.1/1225/SATPOL.PP-B Tanggal 26 Agustus 2025	Selasa, 26 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak

38	No. 300.1/ 1226/SATPOL.PP-B Tanggal 26 Agustus 2025	Rabu, 27 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura di DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	16	Orang	Kota Pontianak
39	No. 300.1/ 1237/SATPOL.PP-B Tanggal 28 Agustus 2025	Kamis, 28 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura di DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	15	Orang	Kota Pontianak
40	No. 300.1/ 1243/SATPOL.PP-B Tanggal 29 Agustus 2025	Jumat, 29 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi Kalbar Bergerak di DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	15	Orang	Kota Pontianak

41	No. 300.1/ 1248/SATPOL.PP-B Tanggal 29 Agustus 2025	Sabtu, 30 Agustus 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi Kalbar Bergerak di DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	15	Orang	Kota Pontianak
42	No. 300.1/ 1259/SATPOL.PP-B Tanggal 1 September 2025	Senin, 1 September 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Universitas Tanjungpura di DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	15	Orang	Kota Pontianak
43	No. 300.1/ 1270/SATPOL.PP-B Tanggal 2 September 2025	Selasa, 2 September 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Universitas Tanjungpura di DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	15	Orang	Kota Pontianak

44	No. 300.1/ 1278/SATPOL.PP-B Tanggal 3 September 2025	Rabu, 3 September 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kalimantan Barat di DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	15	Orang	Kota Pontianak
45	No. 300.1/ 1289/SATPOL.PP-B Tanggal 4 September 2025	Kamis, 4 September 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak	SATPOL PP	11	Orang	Kota Pontianak
46	No. 300.1/ 1290/SATPOL.PP-B Tanggal 4 September 2025	Sabtu, 6 September 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
47	No. 300.1/ 1324/SATPOL.PP-B Tanggal 12 September 2025	Sabtu, 13 September 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak	SATPOL PP	12	Orang	Kota Pontianak

48	No. 300.1/ 1355/SATPOL.PP-B Tanggal 19 September 2025	Jumat, 19 September 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
49	No. 300.1/ 1356 /SATPOL.PP-B Tanggal 19 September 2025	Sabtu, 20 September 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Penguohan Pengurus Provinsi PERSINAS AKAD Kalimantan Barat Masa Bhakti 2025 - 2030 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
50	No. 300.1/ 1366 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 September 2025	Senin, 22 September 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pelantikan Pimpinan Wilayah Ikatan Nahdlatul Ulama (PW. IBNU) Provinsi Kalimantan Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
51	No. 300.1/ 1375 /SATPOL.PP-B Tanggal 23 September 2025	Rabu, 24 September 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak

			Aksi Serikat Petani Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat				
52	No. 300.1/ 1398 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 September 2025	Sabtu, 27 September 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum di Pembukaan Piala Pencak Silat Memperebutkan Piala Gubernur di Gor Terpadu Pontianak.	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak